

## Ringkasan

Reni Kurniawati, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Keterangan Dalam Akta Atau Surat, Komisi Pembimbing Ketua : Dr. Budiyo, S.H., M.Hum. dan Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.

Profesi Notaris sangat rawan terkena jeratan hukum. Hal ini karena faktor internal Notaris misalnya kecerobohan, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan faktor eksternal seperti perilaku dari masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis batasan unsur pemalsuan keterangan dalam akta atau surat oleh Notaris dan pertanggungjawaban Notaris terhadap pemalsuan keterangan dalam akta atau surat.

Metode penelitian yang dipakai yuridis normatif. Sumber data adalah data sekunder yang terbagi dari 3 jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dalam bentuk teks naratif. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, batasan unsur pemalsuan keterangan dalam akta atau surat oleh Notaris, dapat dilihat dari segi perbuatan pelaku dan pihak yang dirugikan. Terdapat unsur kesalahan dalam membuat surat palsu atau memalsu surat yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini yakni seorang Notaris JLS dan Notaris IPH, berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), atau kesengajaan dalam arti sempit. Pertanggungjawaban Notaris terhadap pemalsuan keterangan dalam akta atau surat memiliki tiga segi pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban pidana yaitu Notaris dapat dituntut dengan Pasal 264 ayat (1) KUHP, pertanggungjawaban perdata yaitu akta Notaris dapat dibatalkan dan batal demi hukum, selain itu Notaris juga dapat digugat ke pengadilan, serta pertanggungjawaban etik/ administratif yaitu hukuman etik yang dilakukan oleh organisasi Notaris (INI).

**Kata Kunci : Notaris, Pemalsuan Surat, Pertanggungjawaban**

## **Summary**

*Reni Kurniawati, Notary Masters Study Program, Postgraduate Program, Jenderal Soedirman University, Notary Responsibility Against Falsification of Information in Deeds or Letters, Chief Advisory Commission : Dr. Budiyo, S.H., M.Hum. and Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.*

*The notary profession is very prone to legal bondage. This is due to internal factors such as carelessness, not complying with procedures, not carrying out professional ethics, and external factors such as behavior from the public. This research is aimed at knowing and analyzing the limitations of the elements of falsification of information in deeds or letters by a notary and the accountability of the notary against falsification of information in deeds or letters.*

*The research method used is normative juridical. The data source is secondary data which is divided into 3 types of legal materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials. Research results are in the form of narrative text. The analysis of legal materials used is qualitative normative.*

*The results showed that the limitation of the element of falsification of information in a deed or letter by a notary can be seen in terms of the actions of the perpetrator and the injured party. There is an element of error in making fake letters or forging letters committed by the perpetrator, in this case, namely a JLS Notary and IPH Notary, in the form of intent as an intention (opzet also oogmerk), or deliberate in the narrow sense. The notary's responsibility for falsifying information in deeds or letters has three aspects of responsibility, namely criminal responsibility, namely notaries can be prosecuted under Article 264 paragraph (1) of the Criminal Code, civil liability, namely notarial deeds can be canceled and null and void by law, besides that Notaries can also be sued in court, as well as ethical/administrative accountability, namely ethical penalties carried out by the Notary Organization (INI).*

**Keywords : Notary, Letter Falsification, Accountability**